

Kritik Terhadap Konsep Dasar Zakatnomics (Indeks Pembangunan Zakatnomics)

Adrianna Syariefur Rakhmat

Universitas Pelita Bangsa

adriannasyariefur@pelitabangsa.ac.id

Busaid

Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah CIBEST LPPM IPB

busaid1973@gmail.com

Abstrak *Zakatnomics is a combination of zakat and economics. In other word, it can be termed as the economics of zakat which examines the concept of economic aspects of zakat in the macro and micro scope. This concept is based on 4 pillars of zakatnomics development, namely (1) faith, (2) productivity, (3) economic justice including the potential for halal industry and (4) Zakat Infaq, Shadaqah and Waqf institutions or ZISWAF. This study is a critical analysis of the Index compiled by the Center for Strategic Studies of BAZNAS, the Zakatnomics Development Index. Based on the 4 pillars of zakatnomics development, only the fourth pillar regarding zakat institutions has not been criticized. While the other 3 pillars have been criticized, although there is a regulatory dimension in the first pillar and a dimension of the government's role in the second pillar that have not been criticized.*

Kata Kunci *Zakatnomics, dan BAZNAS*

I. PENDAHULUAN

Zakatnomics merupakan gabungan dari zakat dan economics. Sederhananya dapat diistilahkan sebagai ilmu ekonomi zakat yang mengkaji konsep aspek ekonomi zakat dalam lingkup makro maupun mikro. Zakatnomics merupakan gerakan kesadaran membangun tatanan ekonomi baru untuk mencapai kebahagiaan, keseimbangan kehidupan dan kemuliaan hakiki manusia yang didasari semangat dan nilai-nilai luhur syariat zakat. Tujuan zakatnomics tersebut adalah untuk melihat peran aktivitas zakat, dari pengumpulan dana muzaki, dinamika distribusi hingga *empowerment* kepada mustahik berdampak terhadap perkembangan ekonomi secara luas. Konsep ini didasarkan pada 4 pilar pembangunan zakatnomics yaitu (1) keimanan, (2) produktivitas, (3) keadilan ekonomi termasuk didalamnya potensi halal industri dan (4) kelembagaan Zakat Infaq, Sedekah dan Wakaf atau ZISWAF (Puskas BAZNAS, 2020).

Hubungan antara zakat dengan ekonomi baik itu lingkup makro ataupun mikro telah banyak dipaparkan oleh para peneliti. Zakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan (Triantini, 2015) (Romdhoni, 2017), meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Rachmawati et al, 2019) dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik (Ishak, 2012) (Rahayu dan Adawiyah, 2021).

Kajian ini merupakan analisis kritis terhadap Indeks yang disusun oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS, yaitu Indeks Pembangunan Zakatnomics (IPZN). Penelitian

ini merupakan satu satunya kajian kritis terhadap IPZN yang diinisiasi oleh BAZNAS. Dengan adanya riset ini diharapkan dapat menghasilkan kontribusi ilmiah terhadap perkembangan diskusi mengenai indeks zakat.

II. LANDASAN TEORI

IPZN adalah alat ukur perhitungan semesta kebajikan zakat melalui 4 pilar tersebut diatas. Kajian ini bertujuan untuk Menentukan indikator-indikator yang tepat untuk setiap dimensi dan variabel yang menjadi alat ukur yang reliabel, teruji validitasnya serta mudah diterapkan. Selain itu IPZN akan menawarkan sebuah Model Pengukuran Perkembangan Pembangunan Daerah Secara Holistik yang menggabungkan unsur Material dan Spiritual sebagaimana terangkum dalam prinsip Maqasid al-Syariah meliputi menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Selanjutnya 4 pilar penyusun IPZN tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk dimensi, variable, dan indikator. Pilar pertama adalah spiritualitas yang memiliki 4 (empat) dimensi yaitu hubungan vertikal, hubungan horizontal dukungan infrastruktur dan dukungan regulasi. Setiap dimensi dari pilar spiritualitas memiliki variabel variabel. Dimensi vertikal memiliki variabel *Modified Spiritual Poverty Line* dan potensi rawan pemurtadan. Dimensi hubungan horizontal memiliki variabel kebersihan, keamanan dan kebahagiaan. Dimensi dukungan infrastruktur memiliki variabel jumlah masjid dan musholla, lembaga pendidikan Islam non pesantren, serta jumlah pesantren. Dimensi dukungan regulasi memiliki variabel peraturan daerah bernuansa Syariah, bantuan ke Lembaga Pendidikan Islam dan pesantren, serta Indeks Persepsi Korupsi.

Pilar Produktifitas memiliki 4 (empat) dimensi, yaitu daya saing, budaya produktif, kualitas SDM, dan peran pemerintah. Setiap dimensi dari pilar produktifitas memiliki variabel variabel. Dimensi daya saing memiliki variabel transparansi, inovasi dan kreatifitas serta kemiskinan. Dimensi budaya produktif memiliki variabel jumlah pengusaha, pertumbuhan jumlah UMKM, dan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dimensi kualitas SDM memiliki variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Islam, tingkat pengangguran, demografi dan ekonomi, serta tingkat angka partisipasi sekolah. Dimensi peran pemerintah memiliki variabel pelatihan skill dan keterampilan, visi pembangunan, dan kemajuan desa.

Pilar asas ekonomi halal (keadilan ekonomi) memiliki 4 (empat) dimensi, yaitu distribusi pendapatan, akses ekonomi, industri halal, dan praktik ekonomi Syariah. Setiap dimensi dari pilar asas ekonomi halal memiliki variabel variabel. Dimensi distribusi pendapatan memiliki variabel *Gini Ratio*/Indeks Atkinson dan elastisitas PAD terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimensi akses ekonomi memiliki variabel akses terhadap pekerjaan, akses terhadap layanan public dan sosial, akses terhadap layanan keuangan, dan daya beli konsumen. Dimensi industri halal memiliki variabel persentase jenis industri halal dan sertifikasi harta LPPOM. Dimensi praktik ekonomi Syariah memiliki variabel praktik riba, nasabah bank Syariah dan muzakki.

Pilar zakat (kelembagaan zakat) memiliki 3 (tiga) dimensi, yaitu sosialisasi zakat, kinerja zakat dan kepedulian sosial. Setiap dimensi dari pilar zakat (kelembagaan zakat) memiliki variabel variabel. Dimensi sosialisasi zakat memiliki variabel indeks literasi zakat dan persentase dana zakat yang masuk via bank Syariah. Dimensi kinerja zakat memiliki variabel indeks zakat nasional, indeks ramah zakat, dan peran zakat dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Dimensi kepedulian sosial memiliki variabel jumlah Lembaga sosial keislaman.

Diantara dimensi pada 4 (empat) pilar tersebut memiliki keterkaitan satu sama lainnya baik dalam pilar yang sama maupun pilar yang berbeda. Dalam mengukur keterkaitan antar dimensi, digunakanlah model *Causal Loop Diagram* (CLD) untuk menjelaskan hubungan positif negatif antar dimensi.

Dalam menghitung Indeks Pembangunan Zakatnomics perlu dilakukan pembobotan terhadap masing masing pilar dan dimensi. Pilar spiritualitas memiliki bobot 40 %, pilar produktifitas memiliki bobot 16 %, pilar asas ekonomi halal (keadilan ekonomi) memiliki bobot 21 %, dan pilar zakat (kelembagaan zakat) memiliki bobot 18 %.

Pada pilar spiritualitas, dimensi hubungan vertikal dan horizontal memiliki bobot 30 %, infrastruktur memiliki bobot 20 %, dan regulasi memiliki bobot 19 %. Kemudian pada pilar produktivitas, dimensi daya saing memiliki bobot 18 %, budaya produktif memiliki bobot 22 %, kualitas SDM memiliki bobot 32 %, dan peran pemerintah memiliki bobot 27 %. Selanjutnya pada pilar asas ekonomi halal (keadilan ekonomi), dimensi distribusi pendapatan dan perda syariah memiliki bobot 26 %, akses ekonomi memiliki bobot 23 %, dan jumlah industri halal memiliki bobot 22 %. Terakhir pada pilar zakat (kelembagaan zakat), dimensi sosialisasi zakat memiliki bobot 45 %, kinerja zakat memiliki bobot 26 %, dan kepedulian sosial memiliki bobot 28 % (Puskas BAZNAS, 2020).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa jurnal, dan laporan tahunan serta sumber lain yang membahas tentang IPZN. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mempelajari buku atau literatur dan jurnal ilmiah untuk memperoleh kajian kritis terhadap IPZN. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kritis. Analisis ini diawali dengan memaparkan IPZN, kemudian menganalisis hal hal yang dapat dikritisi dari IPZN.

IV. HASIL PENELITIAN

Secara umum IPZN telah disusun dengan baik dan komprehensif mempertimbangkan aspek akademik seperti penggunaan literatur-literatur hasil penelitian sebagai dasar dalam menentukan setiap variabel dan ketersediaan data, sehingga dapat diimplementasikan. Review ini fokus pada substansi IPZN khususnya penentuan variabel dan indikator yang digunakan. Beberapa hal yang dapat dijadikan masukan dalam menyempurnakan IPZN diantaranya adalah:

a. Pada pilar 1 (Spiritualitas).

Spiritualitas dapat dicerminkan dengan terlaksannanya semua unsur yang ada dalam Rukun Islam dengan baik.

- 1) Ibadah Haji merupakan salah satu Rukun Islam yang sangat terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat dan belum tercermin dalam semua dimensi dalam pilar ini. Haji merupakan bentuk ibadah yang tidak hanya menekankan kekuatan keimanan tetapi juga kemampuan/kekuatan ekonomi, sehingga akan mempunyai pengaruh terhadap zakatnomics itu sendiri.

Ibadah haji memiliki 3 sisi ekonomi, yang meliputi ekonomi pra haji, saat haji dan pasca haji. Sisi ekonomi saat haji meliputi sedekah, badal haji, dam saat haji dan pasca haji meliputi kedisiplinan membayar zakat dan kesediaan member harta kepada yang membutuhkan (infaq, sedekah dan manihah) merupakan (Tanjung, 2010)

Untuk itu, menjadi perlu memasukkan unsur ini menjadi salah satu variabel dari dimensi yang ada dalam pilar ini dan yang lebih cocok adalah Dimensi Hubungan Vertikal. Sementara itu, sebagai indikator dapat digunakan rasio jumlah jamaah haji terhadap penduduk muslim.

- 2) Ibadah haji juga berhubungan erat dengan pelaksanaan qurban yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan qurban mempunyai dimensi hubungan sesama manusia selain hubungan vertikal. Oleh karena itu, perlu dimasukkan dalam Dimensi Hubungan Horisontal dengan menjadikan rasio jumlah hewan qurban terhadap jumlah penduduk muslim sebagai indikator.
- 3) Pengukuran tingkat keamanan dalam Indeks Pembangunan Zakatnomics jika mengikuti apa yang dilakukan Vlandari (2016) mengenai indeks kejahatan dan jumlah pos keamanan adalah terlalu memperhatikan aspek kuantitas dari keamanan itu sendiri, belum memperhatikan aspek kualitas. Oleh karena itu perlu mempertimbangkan rasio atau proporsi untuk menilai kualitas keamanan, seperti indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terkait keamanan (BPS, 2021), diantaranya ;
 - Proporsi korban kekerasan yang melapor polisi
 - Proporsi korban kejahatan kekerasan
 - Proporsi rumah tangga yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat Penelitian yang dilakukan Vlandari (2016) mengenai pos keamanan juga tidak dijelaskan secara eksplisit. Apakah yang dimaksud pos keamanan adalah pos polisi atau pos keamanan lingkungan (Poskamling). Karena dalam Statistik Kriminal tahun 2020 terdapat data mengenai proporsi keberadaan Poskamling dan pos polisi (BPS, 2020).
- 4) Dimensi Dukungan Infrastruktur. Jika dicermati lebih jauh merupakan cerminan dari media dakwah yang dapat digunakan untuk meningkat nilai spiritualitas masyarakat. Ini terlihat dari variabel yang digunakan yaitu jumlah masjid dan musholla, jumlah lembaga pendidikan Islam non pesantren, dan jumlah pesantren. Sementara itu, media dakwah saat ini tidak hanya melalui 3 sarana tersebut, juga bisa melalui media online dan elektronik yang juga dapat dijadikan sebagai dimensi tersendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh Rakhmawati (2016), bahwa macam-macam media sebagai penunjang perkembangan media dakwah diantaranya, media audio visual, media visual, media individual, media cetak, dan media elektronik termasuk internet. Namun karena IPZN merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk setiap daerah, maka media ini kurang tepat digunakan karena tidak setiap daerah terutama kabupaten/kota memiliki media ini.

Selain itu, Majelis Taklim yang sekarang berkembang sampai ke tingkat RW/RT juga menjadi media untuk meningkatkan spiritualitas masyarakat terutama kaum ibu. Bahkan menurut Ramlah (2017), majelis taklim merupakan salah satu lembaga pendidikan nonformal yang mempunyai fungsi dan peranan dalam pembinaan umat, sebagai tempat pendidikan rohaniyah dan sebagai tempat syiar Islam dan silaturahmi antara ulama, umara (pemerintah) dengan umat. Untuk itu, pada dimensi ini dapat ditambahkan variabel Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dengan rasio

jumlah Majelis Taklim (MT) terhadap penduduk muslim (Wanita) sebagai indikatornya.

- 5) Penggunaan variabel Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) masih memiliki kekurangan untuk dimasukkan kedalam dimensi regulasi. Baik IPK maupun IPAK sama sama memiliki kendala sampel jika yang akan diukur adalah daerah. Responden IPK berjumlah 1200 orang yang tersebar di 12 kota terpilih (TII, 2017). Sementara responden IPAK berjumlah 10.040 rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi (BPS, 2020). Penggunaan IPAK akan lebih dapat mewakili tingkat integritas suatu daerah, namun jumlah sampelnya jika dilihat dari masing masing provinsi masih sangatlah kurang.

b. Pada pilar 2 (Keadilan Ekonomi)

- 1) Pada dimensi Daya Saing, perlu ditambahkan Variabel Kualitas Lingkungan karena ini sangat penting dalam kaitannya dengan daya saing yang berkelanjutan sebagaimana hasil studi KPPOD (2020) tentang indeks daya saing daerah berkelanjutan (IDSDB) dimana lingkungan menjadi salah satu dari empat pilarnya, yakni: (1) lingkungan lestari, (2) ekonomi tangguh (*robust economy*), (3) sosial inklusif, dan (4) tata kelola yang baik. Adapun yang dapat dijadikan indikatornya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
- 2) Pada dimensi budaya produktif terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mengukur kualitasnya bukan kuantitasnya. Memang tidak ditemukan PAD per kapita, tapi tentunya dapat dihitung dengan dibagi jumlah penduduk pada suatu daerah. Atau juga dapat menggunakan PDRB per kapita, karena beberapa penelitian sebelumnya juga PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap PAD (Murib et al, 2016) (Elly, 2013).
- 3) Dimensi kualitas SDM terkait variabel demografi dan ekonomi mengacu pada Kelley dan Schmidt (1995), bahwa pada buku Indeks Pembangunan Zakatnomics disebutkan hubungan antara pertumbuhan demografi dan pertumbuhan ekonomi. Nyatanya justru yang dijelaskan oleh Kelley dan Schmidt (1995), adalah mengenai dampak pertumbuhan populasi terhadap output per kapita bukan pertumbuhan ekonomi.
- 4) Saat ini Indonesia dikaruniai dengan bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif mencapai 70,72 % (BPS, 2020). Bonus demografi menunjukkan jumlah usia 15-64 tahun (usia produktif) lebih besar dibanding total usia kurang dari 15 tahun dan usia lebih dari 64 tahun (usia non produktif). Perbandingan ini dapat dijelaskan oleh *dependency ratio* dengan jumlah penduduk usia produktif sebagai pembilang. Dengan demikian pertumbuhan populasi dapat disubstitusi dengan menggunakan indikator pertumbuhan penduduk usia produktif melalui guna mengedepankan kualitas SDM. Namun saat ini menurut Harasty & Ostermeier (2020) terdapat banyak alternatif pengukuran *dependency ratio*, diantaranya :
 - *Activity Based Dependency Ratio*
 - *Employment Based Dependency Ratio*
 - *Labor Underutilization Dependency Ratio*
 - *Working Property Dependency Ratio*

- *Vulnerable Employment Dependency Ratio*

c. Pada pilar 3 (Keadilan Ekonomi)

1) Ibadah Puasa merupakan ibadah yang secara empiric selalu memberikan pengaruh terhadap perekonomian, terutama dalam pengumpulan ZISWAF maupun tingkat inflasi perekonomian secara nasional. Untuk ZISWAF sudah tercermin dari pilar 4 (Zakat), namun untuk pengaruhnya terhadap perekonomian secara nasional perlu juga ditangkap dan dimasukkan dalam pilar 3 (keadilan ekonomi). Dimensi yang cocok untuk menampung variabel ini adalah dimensi Distribusi Pendapatan. Sedangkan indikator yang dapat digunakan adalah jumlah uang beredar saat lebaran.

2) Pada dimensi Akses Ekonomi, terdapat variabel *Equal access to financial service* dengan indikator tingkat literasi keuangan. Variabel ini sangat penting karena selama ini permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM termasuk didalamnya UMKM halal adalah akses dalam memperoleh pembiayaan dari perbankan. Namun demikian, masalah akses keuangan tidak hanya disebabkan oleh pihak nasabah/UMKM sehingga indikator tingkat literasi keuangan tidaklah cukup. Perlu ditambahkan indikator lain dengan memperhatikan komitmen/keseriusan pihak perbankan untuk menyalurkan pembiayaannya untuk UMKM (halal). Untuk itu, perlu ditambahkan indikator lain yaitu: rasio jumlah pembiayaan yang disalurkan untuk sector UMKM (halal) terhadap total pembiayaan yang disalurkan perbankan.

Selain itu, permasalahan akses keuangan khususnya permodalan jumlah lembaga yang memberikan pembiayaan juga sangat penting. Semakin banyak lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan maka semakin meningkatkan akses finansial masyarakat terhadap pembiayaan. Untuk itu, maka juga perlu ditambahkan indikator rasio jumlah lembaga keuangan syariah (BUS, BPRS, dan BMT) terhadap jumlah penduduk muslim.

3) Pada dimensi akses ekonomi, terdapat daya beli konsumen dengan menggunakan indikator Indeks Tendensi Konsumen (ITK). Daya beli konsumen sebaiknya dapat menggunakan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*) yang menjadi indikator pengeluaran per kapita. Salah satu keunggulan PPP adalah lebih banyak mengakomodasi lebih banyak komoditas, yaitu menggunakan 96 komoditas (66 makanan dan 30 non makanan). Sementara ITK menggunakan 20 komoditas (11 makanan dan 9 non makanan).

4) Pada dimensi Industri Halal, terdapat variabel Persentase Jenis Industri Halal dengan indikator Jenis Industri Halal yang terbagi 5: Makanan, Wisata, Fashion, Hotel & Spa serta Obat & Kosmetik. Perlu diperjelas yang dimaksud dalam indikator tersebut, jika yang dimaksud adalah persentase jumlah setiap jenis industri halal terhadap industri sejenis maka penulisannya perlu dituliskan seperti itu dan pada variable sebaiknya kata “persentase” dihilangkan sehingga variable menjadi “Jenis Industri Halal.” Selain itu, dengan variable tersebut maka indikator juga bisa ditambahkan dengan persentase omset industri halal terhadap industri sejenis atau persentase jumlah total omset industri halal terhadap total omset industri.

- 5) Variabel Seritikasi Halal LPPOM pada dimensi Industri Halal, diproxi dengan indikator Jumlah Indutri Halal yang sudah memiliki Sertifikat Halal. Mengingat IPZN ini merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk semua wilayah, sementara setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda terutama terkait dengan jumlah penduduk muslimnya, maka sebaiknya yang digunakan sebagai indicator adalah rasio Jumlah Indutri Halal yang sudah memiliki Sertifikat Halal terhadap total industri halal.
 - 6) Variabel Praktik Riba pada dimensi Praktik Ekonomi Syariah, menggunakan jumlah tabungan riba dengan JPM, mungkin yang dimaksud adalah rasio antara keduanya. Namun demikian, praktik riba tidak hanya dilihat dari jumlah tabungan yang identic dengan perbankan tapi juga dapat dilihat dari jumlah pembiayaan riba. Karena yang praktik riba (membungkakan uang) biasa dilakukan oleh orang seorang secara pribadi atau oleh lembaga keuangan (Buhari, 2020). Sementara lembaga keuangan tidak hanya bank tetapi juga termasuk non bank seperti leasing yang hanya memberikan pembiayaan tidak tabungan. Untuk itu, jika pembiayaan di perbankan menggambarkan jumlah tabungan, maka untuk di lembaga keuangan lainnya seperti *Leasing* juga perlu dipertimbangkan. Sehingga perlu juga ditambahkan indicator rasio total pembiayaan terhadap JPM.
 - 7) Variabel Nasabah Bank Syariah pada dimensi Praktik Ekonomi Syariah dengan indicator rasio nasabah bank syariah terhadap JPM, dirasa kurang menggambarkan kondisi riil yang terjadi di masyarakat. Dimana aktivitas keuangan syariah tidak hanya dilakukan oleh perbankan syariah tetapi juga oleh Baitul Mal Wattamwil (BMT). Sebagaimana disampaikan oleh Laili dan Rohmawati (2020) yang menyatakan bahwa BMT telah memberikan akses layanan keuangan syariah dengan memberikan permodalan bagi mayarakat khususnya bagi pedagang atau UMKM. Untuk itu, variabel yang digunakan sebaiknya Nasabah Bank Syariah dan BMT, sehingga indicator menjadi rasio nasabah Bank Syariah dan BMT terhadap JPM.
- d. Pada pilar 4 (Kelembagaan Zakat)
- Semua dimensi, variabel, dan indikator pada pilar ini telah dapat menggambarkan dengan baik pilar Kelembagaan Zakat.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan pada riset ini adalah bahwa dari 4 pilar pembangunan zakatnomics, hanya pilar keempat mengenai kelembagaan zakat yang belum diberikan kritik. Sementara 3 pilar lainnya sudah diberikan kritik meskipun ada dimensi regulasi pada pilar pertama dan dimensi peran pemerintah yang belum diberikan kritik. Maka untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melanjutkan analisis kritis ini sehingga membawa kepada arah pengembangan konsep zakatnomics yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2020. Statistik Kriminal. Jakarta : BPS

_____.2020. Indeks Prilaku Anti Korupsi. Jakarta : BPS

Buhari, A.T. (2020). Bank dan Riba: Implikasinya dalam Ekonomi Islam. Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, 6(1), 127-136.

- Elly, L. 2013. Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Sebelumnya Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11 (02), 275-287.
- Harasty, C., & Ostermeier, M. 2020. *Population Ageing : Alternative Measures of Dependency and Implications for The Future of Work*. ILO Working Paper 5 (Geneva ILO).
- Ishak, K. (2012). Zakat Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebuah Alternatif Dalam Peningkatan Kesejahteraan. *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1(1), 166-181.
- Kelley, A. C., & Schmidt, R. M. (1995). *Aggregate Population And Economic Growth Correlations: The Role of The Components of Demographic Change*. *Demography*, 32(4), 543-555.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2020). *Daya Saing Berkelanjutan: Studi Peningkatan di 356 Kabupaten*. Laporan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan. Jakarta : KPPOD.
- Laili, N.Y. dan Rohmawati, K. (2020). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 436-443.
- Murib, D. Koleangan, R. A. M, & Tolosang, K.D. 2018. Pengaruh jumlah penduduk, pendapatan perkapita, PDRB terhadap PAD di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18 (1), 23-33.
- Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional. 2020. *Indeks Pembangunan Zakatnomics*. Jakarta : BAZNAS
- Rachmawati, E. N. Azmansyah. dan Utami, T. T. (2019). Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(2), 1-14.
- Rakhmawati, I. (2016). Perkembangan Media Sebagai Sarana Dakwah. *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 4 (1), 49-70.
- Ramlah, M. (2017). Majelis Taklim dan Peranannya dalam Peningkatan Dakwah di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo. *PALITA: Journal of Social-Religion Research*, 2(1), 55-72.
- Rayahu, F. dan Adawiyah, R. (2021). Efektivitas Dana Zakat Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 6(1).
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan, 3(1), 41-51.

-
- Tanjung, H. (2010). Hikmah Ibadah Haji Terhadap Ekonomi. Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 1 No. 1, September 2010 pp. 6-20.
- Transparancy International Indonesia. 2017. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Jakarta : TII
- Triantini, Z. E. (2015). Urgensi Regulasi Zakat Dalam Pertumbuhan Ekonomi. Istinbath, Jurnal Hukum Islam, 14(1), 85-99.
- Vulandari, R. T. (2016). Pengelompokan Tingkat Keamanan Wilayah Jawa Tengah Berdasarkan Indeks Kejahatan dan Jumlah Pos Keamanan Dengan Metode Klastering K-MEANS. Jurnal Ilmiah SINUS, 14(2), 59-72.